
BOYCOT JEPANG!: NASIONALISME CINA PERANTAUAN DI MAKASSAR 1915-1937

Heri Kusuma Tarupay

Program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Abstrak

Gerakan boikot di Makassar tidak lagi menjadi hanya semacam penolakan terhadap tindakan Jepang di Cina, tetapi lebih jauh telah memperlihatkan bentuk pembayangan akan bagian dari kesatuan bangsa Cina yang dibayangkan, dalam ruang lingkup geografis yang berbeda. Jalannya gerakan ini menunjukkan bahwa demi terwujudnya masyarakat yang satu, apapun akan dilakukan untuk membelanya. Sejauh efektifitasnya, gerakan boikot terbilang tidak berjalan dengan efektif, dikarenakan tidak bisa merangkul semua masyarakat Cina di Makassar untuk turut serta. Pengawasan dari pemerintah colonial telah turut memberikan sumbangsih tidak berjalan efektifnya gerakan ini. Gerakan boikot di wilayah koloni, telah menunjukkan bahwa masyarakat Cina dalam kurun waktu tertentu juga melakukan kegiatan politik. Bersamaannya waktu gerakan boikot dan gerakan nasionalis Indonesia bisa saja saling memberikan pengaruh.

Kata Kunci: nasionalisme, Cina perantauan, boycott, anti Jepang, kolonial, Makassar

Abstract

Boycott movement in Makassar was not only a sort of rejection of Japanese actions in China, but furthermore has refelected the imagined community as a part of a unified imagined Chinese community beyond the existing geographical space. The ways the movement went showed that towards the making of the unified community, the actors would be willing to do anything. However the boycott movement was not effective since it could not involved the entire Chinese communities in Makassar to participate. Colonial government's surveillance contributed to the movement's lack of effectiveness. The boycott movement showed that Chinese community in the colony in particular period participated in political activities. The fact that the movement took place at almost at the same time with Indonesian nationalist movement suggests the possible influence of these movements one to another.

Keywords: nasionalism, overseas Chinese, boycott, anit-Japanese, colonial, Makassar

PENDAHULUAN

Seringkali dilupakan bahwa migran awal Cina yang datang ke *Nanyang* (wilayah selatan) tidak pernah membayangkan diri mereka sebagai bagian dari bangsa Cina yang besar atau mereka tidak pernah membayangkan dirinya sebagai orang Cina. Seperti diungkapkan Benedict Anderson, bahwa mereka yang datang ke wilayah ini adalah orang-orang yang kebanyakan buta huruf dan hanya memahami bahasa lokal tempat mereka yaitu Hokkien dan Kwantung (Anderson, 2002: 17-18). Artinya bahwa apa yang dikatakan nasionalisme bagi masyarakat Cina perantauan hanyalah sebatas pada daerah asal mereka di Hokkian atau Kwantung. Lebih jauh Anderson menjelaskan bahwa Nasionalisme justru kebanyakan berkembang di wilayah perantauan terlebih dahulu dibandingkan dengan di Cina daratan sendiri (Anderson, 2002: 18). Ketika berangkat dari daerah asalnya, mereka tidak pernah membayangkan dikelompokkan dalam sebutan Cina. Pemerintah koloniallah yang tanpa pernah mengetahui kondisi di Cina daratan, dengan serampangan memasukkan mereka dalam satu sebutan yaitu orang Cina. Pemahaman ini menjadi penting karena akan menjelaskan kenapa kebangkitan nasionalisme akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi titik balik dari kehidupan masyarakat Cina di perantauan. Apalagi ketika tahun 1912, revolusi Cina berhasil dilakukan di Cina daratan, pembayangan akan kesatuan bangsa Cina yang besar mendekati kenyataan.

Masyarakat Cina yang bermigrasi awal, tidak pernah mengenal akan konsep kesatuan masyarakat Cina yang besar. Apalagi kekaisaran Manchu (seringkali disebut Dinasti Ching) yang berkuasa atas wilayah itu melarang mereka yang telah pergi untuk kembali ke Cina dikarenakan dianggap melanggar aturan kekaisaran. Maka, selama di perantauan pemikiran akan menjadi bagian dari bangsa Cina yang besar tidak lagi terpikirkan oleh para

perantau ini.

Perubahan mulai terjadi, ketika seorang dokter berkebangsaan Cina yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat bernama Sun Yat Sen, mulai mengkonsolidasikan pemikirannya untuk menggulingkan dinasti kekaisaran yang dianggap tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Pengaruh dari pendidikannya dan berbagai kejadian di dunia awal abad ke-20 yaitu revolusi di beberapa negara di Eropa, telah mempengaruhi pemikirannya untuk menggulingkan dinasti kekaisaran yang telah bertahan sangat lama di Cina. Gerakan ini tidak hanya melibatkan masyarakat Cina yang bertempat tinggal di wilayah daratan Cina sendiri, tetapi Sun Yat Sen juga menganggap bahwa orang-orang Cina yang tinggal di perantauan harus juga dilibatkan untuk menjalankan gerakan ini.

Pelibatan ini mendapat sambutan dari masyarakat Cina perantauan di Hindia, diantaranya dengan mendirikan organisasi-organisasi dan juga membentuk pers berbahasa mandarin sebagai corong mendukung gerakan yang dilakukan oleh dr. Sun Yat Sen di Cina daratan. Kegiatan yang sering diistilahkan dengan Resinifikasi yang lebih tepatnya diartikan Pencinaan masyarakat Cina perantauan. Ketika revolusi berhasil menggulingkan dinasti Manchu di tahun 1912, masyarakat Cina perantauan juga merayakan keberhasilan tersebut. Setelahnya, masyarakat Cina kemudian terus-menerus menjaga hubungan dengan Cina daratan. Berbagai peristiwa di Cina daratan terutama yang berkaitan dengan aktifitas politik, telah juga menuntun masyarakat Cina perantauan dalam aktifitas politik di Hindia. Salah satu aktifitas politik yang dilakukan pasca revolusi yaitu gerakan boikot untuk memprotes campur tangan Jepang dalam pemerintahan di Cina. Campur tangan Jepang di Cina dianggap mengganggu kedaulatan masyarakat Cina sebagai satu bangsa. Seperti yang dikemukakan Bene-

dict Anderson bahwa bangsa atau *nation* merupakan komunitas yang dibayangkan (imagined communities) yang bersifat terbatas secara inheren dan sekaligus berkedaulatan. Dalam pembayangan ini, anggota suatu bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu, tidak saling kenal terhadap sebagian besar anggota lainnya, tidak pernah bertatap muka dan lebih jauh mungkin tidak pernah mendengar tentang mereka. Tetapi dalam benak mereka muncul pembayangan akan kesatuan (Anderson, 2008: 8). Maka konsep ini menjadi penting mengapa kemudian Gerakan Boikot yang dilakukan di Cina daratan, ditanggapi dengan melakukan aksi serupa di Hindia.

Dengan fokus pada gerakan boikot yang terjadi antara tahun 1915-1937 di Makassar, akan diperlihatkan bagaimana bangsa atau *nation* yang dibayangkan tidak hanya berada dalam satu kesatuan geografis yang berdaulat, tetapi juga telah melampaui kesatuan geografis berdaulat tersebut (Anderson, 2008: 10). Selain itu, gerakan ini mempertunjukkan bahwa masyarakat Cina perantauan tidak hanya stagnan dalam kegiatan perdagangan, tetapi dalam satu kurun waktu, juga terlibat dalam kegiatan politik.

Mona Lohanda seorang arsiparis telah melakukan penelitian mengenai gerakan boikot di Batavia dan Surabaya. Di dua daerah gerakan boikot berakhir berbeda jika dilihat dari segi efektifitasnya. Di Surabaya gerakan ini dinilai berhasil, sedangkan di Batavia dinilai gagal. Tampaknya kedekatan dengan kekuasaan kolonial menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya gerakan boikot di Batavia. Maka itu, dengan melihat Makassar yang letak geografisnya berada jauh dari pusat kontrol kolonial di Batavia, namun juga menjadi pusat perdagangan di bagian timur koloni Hindia, akan dilihat sejauh mana efektifitas gerakan ini. Telah diberitakan oleh surat kabar-surat kabar bahwa gerakan boikot di daerah ini juga cukup

aktif.

TERBENTUKNYA JARINGAN CINA—HINDIA

Upaya dr. Sun Yat Sen untuk melibatkan kelompok Cina perantauan dalam revolusi di Cina tidaklah sebatas pernyataan saja. Upaya tersebut diikuti dengan mengirimkan utusan-utusan dari Cina untuk menyampaikan gagasan revolusioner kepada masyarakat Cina di Asia Tenggara dan terkhusus kepada masyarakat Cina di Hindia. Singapura yang sejak masa perdagangan telah menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dari berbagai daerah di dunia dan kemudian menyebar ke berbagai daerah di Asia Tenggara, juga telah menjadi pintu gerbang dalam penyebaran utusan-utusan Sun Yat Sen ke berbagai wilayah di Asia Tenggara dan juga Hindia. Untuk mengorganisir para progandis-propagandis tersebut, maka pada tahun 1905 didirikan cabang *Tung Meng Hui* di Singapura (Williams, 1960: 55-56). *Tung Meng Hui* merupakan nama perkumpulan yang didirikan Sun Yat Sen di Cina untuk mengorganisir pendukung-pendukungnya dalam upaya menggulingkan dinasti Manchu.

Peran Singapura menjadi penting dalam membentuk jaringan Cina-Hindia dalam kesatuan pemikiran Kuomintang. Jaringan ini menjadi seperti jala yang ditebarkan yang menjangkau berbagai wilayah di Hindia, mulai dari ujung barat ke ujung timur, dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Jaringan ini dan penyebaran paham Kuomintang semakin gencar menjelang revolusi dan setelah revolusi 1912. Jika Benedict Anderson dalam tulisannya menyebutkan bahwa Anarkisme dan semangat anti kolonial telah menghubungkan negaranegara di dunia dalam satu jaringan, maka hubungan Cina dan Hindia dihubungkan oleh dan terutamanya semangat revolusi, republikanisme setelah keberhasilan revolusi dan yang paling utama yang menjadi bahasan dalam tulisan ini

adalah anti Jepang (Anderson, 2015: 3).

Jaringan ini bukannya tanpa kendala. Semangat revolusioner dari Kuomintang yang menjadi paham utama adalah paham yang sangat ditakuti oleh penguasa kolonial. Meskipun penduduk mayoritas di Singapura dan Inggris sepertinya tidak terkait dengan Cina, tetapi ketakutan akan menyebarnya paham-paham revolusioner kepada kelompok mayoritas yang lain menjadi bahan pertimbangan. Bukan tidak mungkin, upaya pemerintah kolonial baik Inggris di Singapura dan Belanda di Hindia dalam memelihara *rust en orde* akan terganggu ketika kelompok mayoritas terpengaruh oleh paham revolusioner dari propagandis Kuomintang. Tidak mengherankan, pemerintah kolonial di Hindia mengejar-ngejar para propagandis Kuomintang dan mengeluarkan mereka sejauh mungkin dari wilayah Hindia. Beberapa kali dilaporkan di surat kabar *Pemberita Makassar*, penangkapan dan pengusiran propagandis-propagandis Kuomintang dari wilayah Hindia (dalam kurun waktu kurang dari seminggu, *Pemberita Makassar* melaporkan berita-berita mengenai penangkapan orang-orang Cina yang masuk ke Makassar tanpa ijin, atau habis masa tinggalnya, lihat: “Kepala Batoe”. *Pemberita Makassar*, XII (54), 3 Maret 1914, hal. 2; “Politie Rapport “tanggal 4 Maret 1914”. *Pemberita Makassar*, XII (54), 3 Maret 1914, hal. 2; “Politie Rapport “tanggal 5 Maret 1914”. *Pemberita Makassar*, XII (55), 6 Maret 1914, hal. 2; “Politie Rapport “tanggal 7 Maret 1914”. *Pemberita Makassar*, XII (57), 9 Maret 1914, hal. 2). Dengan alasan tidak memiliki ijin masuk ke Hindia dan tidak memiliki Kartu Jalan, para propagandis ini ditangkap dan dikirimkan pulang kembali ke negara asalnya. Terlepas dari sikap bermusuhan dari pemerintah kolonial di Hindia, para propagandis yang dikirim dari Cina ini, telah membentuk jaringan tidak terlihat, yang akan berpengaruh dalam hubungan antara daratan Cina dan

masyarakat Cina perantauan di Hindia, yang penting nantinya dalam menanggapi isu-isu anti Jepang yang berkembang di daratan Cina.

MASYARAKAT CINA MAKASSAR

Orang Cina yang datang awal di Makassar tahun 1660an berasal dari provinsi Fukien dan Kwantung. Tidak dipungkiri bahwa mereka yang datang awal adalah para pedagang, yang biasanya tinggal di sekitar wilayah pantai. Untuk yang tinggal menetap, kemudian membangun pemukiman di tempat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Vlaardingen*. *Vlaardingen* terletak di sebelah utara kantor pusat VOC di Benteng Rotterdam.

Politik pengelompokkan berdasarkan ras yang diterapkan VOC dan dilanjutkan pemerintah kolonial Belanda, menempatkan mereka dalam satu perkampungan yang pusatnya di Chinesstraat yang berubah menjadi Tempelstraat dan yang sekarang dikenal dengan sebutan Jalan Sulawesi (Sutherland, 2004: 27). Layaknya di tempat lain yang menjadi kekuasaan VOC, kelompok masyarakat Cina dipimpin oleh satu orang yang diberi sebutan militer yaitu Kapitan. Kapitan ditunjuk oleh pemerintah kolonial dan bertugas untuk menyampaikan peraturan dan kebijakan dari pemerintah kolonial kepada masyarakat Cina. Penting diingat bahwa pengaturan ini, lebih banyak dikhususkan untuk menjaga orang Cina agar pada satu sisi tidak membangun kekuatan yang membahayakan pemerintah kolonial seperti yang terjadi di Batavia 1740 dan yang lebih besar, tetap bisa dijadikan sebagai salah satu kelompok yang bisa memberikan keuntungan ekonomi kepada pemerintah kolonial. Peran ini juga mendasari pemerintah kolonial untuk menjalankan kebijakan pengelompokkan etnis dalam satu tempat (*wijkenstelsel*) dan penggunaan pas jalan (*passenstelsel*) bagi siapa saja orang Cina yang keluar dari wilayah tersebut. Kontrol terhadap

pengelolaan komoditas dagangan diberikan sepenuhnya kepada tokoh-tokoh Cina, yang dianggap bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah. Sebagian besar, kepada para Kapitan, dan nantinya para pembantunya semisal Letnan dan Mayor. Di Makassar mereka mengelola perdagangan candu (*pachter*) dan terutamanya juga mengelola perdagangan kopra, salah satu komoditas penting dari Sulawesi Selatan (komoditas kopra atau apa yang diistilahkan Christiaan Heersink dengan “Green Gold” menjadi barang dagangan penting di akhir abad 19 sampai dengan akhir kekuasaan kolonial. Cina peranakan memegang monopoli copra sejak tahun 1880-1930, sebelum berganti dengan dominasi Cina totok. Komoditas Kopra sebagian besarnya berasal dari Selayar. Orang-orang Cina yang memegang monopoli, tergabung dalam perkumpulan dagang Siang Hwee, yang berada di bawah kontrol pemerintah kolonial Belanda. (Heersink, 1994: 62-63)). Penerapan kebijakan pengumpulan etnis dalam satu tempat bagi orang Cina dan selanjutnya penggunaan pas jalan, utamanya ditujukan untuk bisa mengontrol perdagangan-perdagangan Candu agar tetap dalam jangkauan Kapitan dan teman-temannya yang dekat dengan pemerintah kolonial, dan mengawasi pedagang-pedagang Cina lainnya untuk tidak terlibat dalam pasar gelap, yang bisa merugikan bisnis tersebut (Anderson, 2004: 8).

Orang-orang Cina yang datang pada periode ini kebanyakan adalah laki-laki. Mereka kemudian menikah dengan perempuan lokal di Makassar. Keturunan perkawinan campuran ini yang biasa dimasukkan dalam sebutan Cina peranakan kadangkala lebih dikenal dengan sebutan lokal *Baba*. Sebutan yang diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campur, tidak lagi mengenal budaya asal di daratan Cina, tidak tahu bahasa Mandarin dan umumnya sudah tidak mempraktekkan kebudayaan negeri asal

bapaknyanya. Penting bahwa mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai orang Cina, tetapi pemerintah kolonial yang mengelompokkan mereka dalam sebutan tersebut. Untuk strata dalam masyarakat, mereka dimasukkan ke dalam kelompok *Vreemde Oosterlingen*, sebutan Belanda yang berarti timur jauh, untuk menunjuk asal daerah mereka. Terkhusus untuk orang Cina, pemerintah kolonial memasukkan mereka dalam istilah sensus *Chineezen* (dalam bahasa Belanda) atau *Chinese* (dalam bahasa Inggris) (Lihat misalnya: *Volkstelling 1930: Deel VII Chineezen en Andere Vreemde Oosterlingen in Nederlandsch-Indie* (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1935); bandingkan istilah ini dengan misalnya *sangleys* atau *sengli* (pedagang) di Filipina).

Akhir abad ke-19, migran kedua masuk, berkat imigrasi besar-besaran yang dibuka pemerintah kolonial, untuk kebutuhan buruh dan kuli. Untuk kasus yang lain, akan ditemukan juga meskipun dalam jumlah yang sedikit, mereka yang datang sebagai korban dari pemberontakan Taiping di Cina, yang takut ditangkap oleh penguasa di Cina dan memilih lari dan salah satu tempat yang dipilih di Hindia adalah Makassar. Mereka yang datang kebanyakan sudah bersama dengan istrinya, bisa berbahasa Mandarin dan kemudian masih mempraktekkan kebudayaan negeri asalnya. Mereka inilah yang seringkali dikelompokkan dalam sebutan Cina totok dalam dialek lokal disebut *Ance*. Anehnya, menurut Anderson, bahwa pemerintah kolonial masih mengelompokkan mereka dengan masyarakat Cina yang lama, dengan sebutan *Vreemde Oosterlingen*. Padahal dalam masyarakat mereka sendiri jelas terjadi persaingan dan saling merendahkan satu dengan yang lainnya.

Jumlah keseluruhan orang Cina di Makassar di periode berjalannya gerakan boikot terus-menerus mengalami peningkatan. Di tahun 1916, jumlah penduduk

Cina adalah 6.900 yang kemudian bertambah cukup signifikan di tahun 1930 menjadi 15.482. Pertambahan jumlah ini kemungkinan dipengaruhi oleh terus-menerus berlangsungnya migrasi oleh kelompok totok. Jumlah penduduk di tahun 1930 didominasi oleh orang Hokkian sebanyak 8819 orang, diikuti oleh orang Kwantong 4790 dan orang Hakka 904 orang. Selebihnya adalah orang Cina daratan dari daerah lain sebanyak 653 orang, kemudian orang Cina yang lahir di luar Cina sebanyak 67 orang, lainnya sebanyak 141 orang (Tarupay, 2012: 28).

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan juga terkait gerakan boikot adalah dunia pers Makassar. Pers dalam hal ini surat kabar menjadi bagian penting dalam penyebaran gagasan. Seperti yang dijelaskan Benedict Anderson, bahwa penemuan kapitalisme cetak, menjadi bagian penting dalam penyebaran gagasan dari para elit berpendidikan. Di kota Makassar sendiri telah ada percetakan-percetakan diantaranya percetakan Drukkerij Apolo dan Drukkerij The Peng Joe. Selain itu, beberapa koran juga memanfaatkan percetakan di Surabaya (Wirawan, 2013: 173-174). Percetakan ini secara langsung berpengaruh dalam kemunculan berbagai jenis surat kabar di Makassar. Diikuti pula dengan hadirnya para penulis-penulis. Bangkitnya pers menjadi gejala di semua kota di Hindia, dan Makassar adalah salah satunya. Propagandis Kuomintang sebagai partai yang menyebarkan gagasan boikot, juga turut serta mendirikan surat kabar di Makassar. Tercatat ada beberapa surat kabar Kuomintang yang terbit di Makassar diantaranya *Sek Kang Siang Po* dan yang cukup radikal adalah *Min Sun Pao* (Wirawan, 2013: 175-176). Surat kabar terakhir tercatat beberapa kali ditegur oleh pemerintah kolonial, karena beritanya. Surat kabar benar-benar memiliki peranan signifikan dalam penyebaran ajakan boikot barang Jepang.

JALANNYA GERAKAN

Tanggal 12 Februari 1914 secara serempak orang-orang Cina di Makassar menutup toko-toko mereka. Bendera dengan lima warna merah, kuning, biru, putih dan hitam, dikibarkan di depan toko-toko yang tertutup tersebut. Bendera yang dikibarkan tersebut merupakan bendera Republik Cina dan kegiatan ini merupakan perayaan memperingati keberhasilan revolusi di tanggal yang sama di tahun 1912, ketika secara resmi kaisar terakhir Cina Pu Yi dipaksa turun dari tahtanya. Masyarakat Cina seringkali mengidentikan peristiwa ini sebagai keberhasilan membebaskan diri dari penjajahan kekuasaan asing (“Hari Besar”. *Pemberita Makassar*, XIII (37), 13 Februari 1914, hal. 2). Kuncir adalah tanda yang seringkali masih terlihat di Hindia, menjadi ciri khas dari orang Cina dan sebagai symbol bentuk penjajahan tersebut. Pemotongan kuncir dianggap sebagai kebebasan dari penjajahan tersebut, yang pertama kali dilakukan oleh Oei Tiong Ham, si raja Gula dari Semarang.

Peristiwa ini bukan lagi sebagai perayaan biasa, tetapi menjadi tanda terjalannya hubungan antara masyarakat Cina perantauan dengan Cina daratan. Bukan lagi sekedar keterhubungan dengan daerah asal, tapi lebih jauh lagi bayangan menjadi bangsa Cina yang besar, bayangan yang selama ini tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat Cina perantauan. Mereka memang terpisah secara geografis, tetapi proses panjang sejak dr. Sun Yat Sen mengajak mereka untuk berjuang bersama dalam revolusi, telah menggabungkan mereka dalam bagian masyarakat Cina yang berdaulat.

Bayangan menjadi bagian dari bangsa Cina yang besar ditunjukkan pula ketika negara yang masih muda ini diintervensi oleh negara tetangganya Jepang. Tahun 1915 Jepang memprotes perjanjian Versailles yang memberikan wilayah Shantung kepada Cina (Eberhard,

1958: 336-337). Keinginan Jepang mengambil alih wilayah Shantung, dianggap oleh masyarakat Cina sebagai upaya mengganggu kedaulatan bangsa Cina. Hal ini menjadi ciri khas dari negara yang menganut konsep kesatuan. Pengambil alihan atau pemisahan suatu wilayah dianggap menciderai kesatuan yang terbangun. Seperti yang dikatakan Anderson bahwa setiap warga suatu bangsa akan melakukan tindakan apapun untuk memelihara pembayangan akan satu bangsa (Anderson, 2008: 11). Demikianlah konsep ini berlaku juga dalam kasus Shantung di Cina. Tindakan ini kemudian ditanggapi dengan melakukan boikot terhadap barang Jepang. Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Cina di Cina daratan, sebagai bentuk solidaritas, masyarakat Cina di Makassar melakukan aksi serupa. Sekelompok pedagang babi melakukan aksi boikot dengan tujuan memprotes tindakan Jepang mengambil alih Shantung ("Boycot". *Pemberita Makassar*, XIII (117), 22 Mei 1915, hal. 2). Gerakan ini terlihat penuh dengan dinamika, karena tidak hanya memperoleh dukungan, tetapi selama dua bulan berjalan, muncul juga penolakan terhadap gerakan ini (dilaporkan dalam *Pemberita Makassar* pada bulan Juli 1915 untuk mencegah adanya boikot terhadap barang Jepang., lihat: "Tjegah Orang Tionghoa Memboykot Barang Jepang". *Pemberita Makassar*, XIII (176), 31 Juli 1915, hal. 2). Gerakan boikot ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu tidak melakukan aktifitas jual beli produk buatan Jepang, tidak melakukan transaksi dengan Bank Jepang dan tidak melakukan persetujuan pengangkutan barang-barang orang Jepang (Lohanda, 2002: 159). Gerakan Boycot semakin marak terjadi, ketika mahasiswa menyerbu kementerian urusan luar negeri di Cina untuk memprotes kesepakatan penyerahan wilayah Shantung kepada Jepang. Demonstrasi yang dikenal dengan sebutan "Gerakan 4 Mei (May Fourth Movement)" kemudian menyeru-

kan melakukan boikot terhadap Jepang sebagai bentuk protes. Masyarakat Cina di Makassar pun menyambut ajakan ini dengan turut pula melakukan boikot.

Sejak tahun 1918, kebijakan pengelompokkan dalam satu kampung terhadap orang Cina, dan penggunaan pas jalan jika ingin bepergian keluar dari kampung Cina, telah dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setidaknya kebijakan ini memberi kebebasan kepada orang Cina untuk lebih bisa bergerak bebas, dibanding masa-masa ketika aturan tersebut masih diterapkan. Ini menjadi tanda, bisa berjalannya beberapa kali gerakan boikot pada periode berikutnya (akan dibahas lebih lanjut). Meskipun pemerintah kolonial masih memasang petugas-petugasnya dalam mengawasi masyarakat ini.

Untuk lebih mendukung penyebaran paham-paham Kuomintang di Makassar, maka pada bulan November 1927, dibentuk surat kabar bernama *Min Sun Yit Po* (dalam beberapa sumber disebut *Min Sun Pao*) (Poeze, 1982: 180). Kuomintang merupakan partai politik yang menjadi kendaraan Sun Yat Sen dan para pengikutnya dalam mengatur pemerintahan Republik Cina pasca revolusi. Kehadiran surat kabar ini menjadi salah satu sarana penting dalam menyebarkan gerakan-gerakan boikot. Telah umum diketahui bahwa tidak semua masyarakat mendukung gerakan ini. Surat kabar ini kemudian dijadikan salah satu alat untuk mengajak masyarakat lainnya untuk mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat di Cina daratan atau untuk mendukung program pemerintahan di Cina daratan. Beruntung gerakan ini hadir pada periode dimana percetakan telah ditemukan. Andai saja hadir di periode sebelumnya, bisa dibayangkan sulitnya menyebarkan suatu gagasan kepada lain orang di tempat yang berbeda.

Aksi boikot terhadap barang Jepang semakin marak terjadi di tahun 1920an. Pada tahun 1925, beberapa orang pekerja

pabrik katun Jepang di Shanghai menuntut kenaikan upah dan perbaikan jam kerja. Tuntutan ini kemudian ditanggapi dengan menembak mati pemimpin demonstrasi ini. Polisi Inggris yang bekerja sama dengan Jepang, diminta bantuannya untuk menindak para demonstran (Taniputera, 2008: 552). Tindakan ini kemudian kembali menyulut amarah mahasiswa Shanghai dan menyerukan untuk melakukan aksi boikot terhadap barang Jepang dan Inggris. Di Makassar ajakan ini hanya dilakukan dengan memboikot barang Jepang.

Gerakan boikot antara tahun 1925 sampai tahun 1928 sangat sering diberitakan. Hal ini dikarenakan ada dua peristiwa di Cina daratan yang menuntut dilakukannya boikot. Setelah protes mahasiswa terkait pembunuhan para buruh di Shanghai, boikot kembali dilakukan untuk memprotes upaya Jepang menghalangi ekspedisi ke Utara yang dilakukan oleh tentara Kuomintang dibawah pimpinan Chiang Kai Sek. Pertempuran antara pasukan ekspedisi dan tentara Jepang di Tsinan menuai protes dari masyarakat Cina dan kembali menyerukan aksi boikot terhadap Jepang. Di kalangan masyarakat Cina Makassar, gerakan boikot ini tampaknya tidak disetujui oleh semua pihak. Mereka yang melakukan aksi boikot kemudian mendesak masyarakat lainnya untuk melakukan aksi serupa (Poeze, 1982: 133). Surat kabar yang berafiliasi ke Kuomintang dijadikan sebagai corong ajakan kepada mereka yang tidak mau melakukan boycott. Ajakan serupa dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin perkumpulan di Makassar dan Kalimantan (Wirawan, 2013: 154-155). Bahkan dalam beberapa kasus, ajakan untuk melakukan boikot dilakukan dengan kekerasan dan ancaman. Seperti yang menimpa seorang pedagang, yang telinganya dipotong karena tidak mau mengambil bagian dalam kegiatan boikot

(Poeze, 1982: 369; “Banjarknja Orang Diantjam”. *Pemberita Makassar*, XXV (225), 1 Oktober 1928, hal. 2). Artinya bahwa melalui gerakan boikot ini bisa dilihat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat ini, yang tidak bisa dipandang sebagai satu kelompok yang sama saja. Pandangan yang seringkali dilihat oleh kelompok mayoritas.

Permusuhan terhadap Jepang semakin memanas di tahun 1930an. Perang terbuka pun tidak terhindarkan ketika pada tengah malam tanggal 18 September 1931, Jepang menyerbu Mukden di Provinsi Shenyang. Pemerintah yang lebih memilih melaporkan kasus ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bertolak belakang dengan aksi yang dilakukan masyarakat luas (Eberhard, 1958: 344). Penyerbuan Jepang ini ditanggapi dengan kembali melakukan boikot terhadap barang Jepang. Sementara itu, di daerah perantauan, kegiatan-kegiatan politik masyarakat ditujukan kepada insiden ini. Meskipun pemerintah kolonial Belanda tidak mengizinkan adanya aksi boikot, tetapi pendukung aksi boikot tetap melakukan penyebaran pamflet untuk mengajak masyarakat Cina melakukan aksi boikot. Artikel-artikel di Surat kabar pun memberitakan mengenai ajakan untuk melakukan aksi boikot, yang membuat pemerintah kolonial Belanda merasa perlu untuk memberikan peringatan keras terhadap surat kabar Min Sun Pao berkaitan dengan artikel-artikel yang diterbitkan (Poeze, 1988: 136).

Jepang menjadi salah satu negara paling agresif menjelang akhir tahun 1930an. setelah menyerbu Mukden dalam serangan tiba-tiba, Jepang kemudian meluaskan upaya pendudukannya dengan menyerang daerah-daerah lain di Cina. pertempuran paling terkenal adalah yang terjadi di Jembatan Marcopolo pada tanggal 7 Juli 1937 (Eberhard, 1958: 346). Setelahnya, Jepang kemudian menyerbu Peking yang menjadi pusat kekuasaan di

bagian utara dan bergerak lebih jauh dengan menduduki Shanghai sebulan setelahnya. Penyerbuan Jepang ke wilayah Cina menuai protes kembali dari masyarakat Cina baik di Cina daratan, maupun yang ada di perantauan. Dalam boikot ini, surat kabar memiliki peranan besar. Surat kabar Hua Chiao Yit Po dan Min Sun Pao memuat artikel-artikel yang intinya mengajak pembacanya melakukan boikot. Menariknya bahwa pemerintah kolonial tampaknya mulai khawatir dengan aktifitas boikot yang dilakukan oleh masyarakat Cina di Makassar. Terkait dengan tulisan-tulisan boikot yang dimuat di surat kabar, pemerintah kolonial kemudian memberikan teguran kepada surat kabar-surat kabar dan melarang menerbitkan berita mengenai boikot. Ketakutan memberikan dampak buruk kepada masyarakat pribumi menjadi alasan penting pelarangan ini. Campur tangan pemerintah kolonial menjadi penting nantinya untuk melihat sejauh mana efektifitas gerakan ini di Makassar.

Tidak hanya melakukan gerakan boikot, di beberapa tempat, orang Cina telah mengumpulkan sumbangan bagi para korban di Cina daratan. Satu bentuk ekspresi yang lain, dari adanya solidaritas bersama, kalau tidak pembayangan menjadi satu masyarakat yang memiliki masalah yang serupa. Meskipun peranakan dan totok seringkali berpandangan berbeda dalam memandang pengumpulan sumbangan ini, atau tidak saling mendukung, tetapi dari kedua kelompok ini masing-masing berupaya untuk memberikan bantuan materil terhadap masyarakat Cina di daratan Tiongkok.

TANGGAPAN PEMERINTAH KOLO- NIAL

Meskipun gerakan boikot merupakan hubungan segitiga antara Cina daratan, Cina perantauan dan Jepang, namun bagi Cina perantauan sulit untuk memisahkan gerakan boikot ini dengan pemerintah

setempat. Dalam hal ini gerakan boikot yang dilakukan masyarakat Cina di Makassar sulit dipisahkan dengan pemerintah kolonial Belanda. Sejauh terlihat, gerakan yang memprotes tindakan Jepang di Cina daratan tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintah kolonial Belanda.

Namun, gerakan boikot ini menjadi masalah bagi pemerintah kolonial jika dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat lain. Sudah umum diketahui bahwa pemerintah kolonial Belanda akan menjauhkan berbagai pengaruh yang bisa menimbulkan gangguan terhadap koloni di Hindia. Pengaruh yang bisa membangkitkan kesadaran masyarakat pribumi terhadap pendudukan Belanda tidak akan mendapat kebebasan di koloni. Termasuk juga jika dikaitkan dengan gerakan boikot. Jangan dilupakan bahwa di periode-periode tahun awal abad ke-20, nasionalisme negara-negara di Asia Tenggara dan di Rusia sedang bangkit. Jepang baru saja mengalahkan negara besar Rusia dalam pertempuran laut yang dikenal dengan perang Tsushima tahun 1905. Di Filipinanya Spanyol, baru saja meletus pemberontakan yang dipimpin oleh orang lokal Andres Bonifacio pada Agustus 1896 (Anderson, 2002: 352). Pramoedya dengan cerdasnya menggambarkan ketakutan pemerintah kolonial akan dampak dari kejadian di Filipina berpengaruh terhadap masyarakat di Hindia, dalam bagian terakhir tetralogi *Buru, Rumah Kaca*. Di tahun 1914, baru saja meletus revolusi proletariat yang menggulingkan kekuasaan Tsar di Rusia. Rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut membuat pemerintah kolonial merasa cemas, memikirkan hal serupa bisa saja terjadi di Hindia. Untuk itu, pengaruh dari luar sangat diawasi dan diwaspadai.

Sudah sejak mulai dikirimkannya propagandis-propagandis Kuomintang ke wilayah Hindia untuk menyebarkan gagasan-gagasan Kuomintang kepada

masyarakat di perantauan, pemerintah kolonial Belanda telah melakukan resistensinya. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa ketakutan gagasan revolusi dari daratan Cina akan membangkitkan semangat pribumi untuk juga melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial adalah alasan utama resistensi tersebut. Sangat sering diberitakan dalam surat kabar *Pemberita Makassar*, penangkapan propagandis-propagandis Kuomintang oleh Polisi Kolonial karena tidak memiliki izin masuk ke Hindia, atau habis masa berlaku izin tinggalnya yang kemudian menyebabkan mereka diekstradisi dari wilayah Hindia. Memang bahwa pemerintah kolonial mengizinkan pendirian surat kabar-surat kabar oleh orang Cina, namun konten beritanya diawasi penuh oleh pemerintah.

Pengawasan yang ketat terhadap para propagandis-propagandis Kuomintang telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam efektifitas gerakan boikot yang dilakukan oleh masyarakat Cina di Makassar. Boycot pertama yang terjadi tahun 1915, belum menimbulkan perlawanan dari pemerintah kolonial. Belum diberitakan adanya penolakan dari otoritas lokal terhadap gerakan ini. Meskipun beberapa kali diberitakan adanya penangkapan terhadap orang-orang Cina yang tidak memiliki izin resmi masuk ke wilayah koloni atau izin tinggalnya telah habis. Tidak ada laporan mengenai pelarangan pemerintah kolonial terhadap aktifitas boikot kedua di tahun 1919. Bahkan pada tahun 1927, pemerintah kolonial merestui berdirinya surat kabar Kuomintang.

Pemerintah lokal Makassar pertama kali diberitakan melakukan pelarangan terhadap aksi boikot di bulan Mei 1928, ketika 6 orang yang dianggap bertanggungjawab terhadap aksi boikot ditangkap (Poeze, 1982: 343). Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab pemerintah kolonial melakukan pelaran-

gan terhadap aksi boikot. Tetapi bisa diduga, hal ini terkait dengan munculnya artikel di surat kabar *Min Sun Pao* pada bulan Desember 1927. Dalam laporan yang dirangkum Harry Poeze, diberitakan bahwa berbagai surat kabar menuntut penindasan terhadap imperialisme (Poeze, 1982: 202). Meskipun ini tampaknya lebih diarahkan terhadap aksi Jepang dibantu Inggris dalam pembunuhan buruh-buruh pabrik katun di Cina, tetapi tampaknya pemerintah kolonial merasa laporan ini akan berdampak buruk terhadap wilayah koloni. Apalagi tindakan pemerintah kolonial menjajah Indonesia adalah salah satu bentuk imperialisme. Setelah 1928, pemerintah kolonial kemudian sangat ketat dalam mengawasi gerakan boikot di Makassar. Penangkapan terhadap mereka yang melakukan boikot semakin marak dilakukan dan pengawasan terhadap artikel surat kabar yang berafiliasi ke Kuomintang semakin ketat. Laporan mengenai boikot akan diawasi dan lebih jauh akan dilakukan pembredelan terhadap surat kabar yang terus-menerus memberitakan gerakan boikot (Poeze, 1994: 217, 270, 332). Pemerintah kolonial juga melindungi orang-orang Cina di Makassar yang tidak mau melakukan boikot, tetapi mendapat ancaman dari para pendukung boikot.

Campur tangan atau pengawasan pemerintah kolonial terhadap gerakan boikot di Makassar telah pula memberikan dampak terhadap efektifitas gerakan ini. Pengawasan terhadap ajakan boikot di Surat kabar maupun penangkapan para aktifis boikot membuat gerakan boikot tidak berjalan dengan efektif di Makassar. Hal ini didukung pula dengan tidak semua masyarakat Cina Makassar menyepakati gerakan boikot ini.

KESIMPULAN

Gerakan boikot tidak lagi menjadi hanya semacam penolakan terhadap tindakan Jepang, tetapi lebih jauh telah memperli-

hatkan bentuk pembayangan akan bagian dari kesatuan bangsa Cina yang dibayangkan, dalam ruang lingkup geografis yang berbeda. Jalannya gerakan ini sebagai bentuk protes terhadap bentuk kesatuan yang dibayangkan. Dan jalannya gerakan ini pula, menunjukkan bahwa demi terwujudnya masyarakat yang satu, apapun akan dilakukan untuk membelanya. Termasuk melakukan aksi kekerasan terhadap mereka yang tidak menyetujui gerakan ini.

Sejauh efektifitasnya, gerakan boikot terbilang tidak berjalan dengan efektif, dikarenakan tidak bisa merangkul semua masyarakat Cina di Makassar untuk turut serta dalam gerakan ini sehingga memberikan dampak terhadap tindakan yang dilakukan Jepang. Pengawasan dari pemerintah kolonial, telah turut memberikan sumbangsih tidak berjalan efektifnya gerakan ini. Meskipun pemerintah kolonial lebih takut dampaknya terhadap masyarakat pribumi, tetapi pengawasan dan pelarangan oleh pemerintah kolonial menjadi salah satu faktor gerakan ini tidak berjalan efektif.

Namun, setidaknya gerakan boikot di wilayah koloni, telah menunjukkan bahwa masyarakat Cina tidak hanya stagnan dalam kegiatan perdagangan, tetapi dalam kurun waktu tertentu, mereka memperlihatkan bahwa mereka juga melakukan kegiatan politik. Tentu saja perlu melakukan penelitian lebih jauh, sejauh mana gerakan politik orang Cina ini, memberikan pengaruh terhadap gerakan politik menuju terbentuknya negara yang merdeka dari penjajahan kolonial. Bersamaannya waktu gerakan boikot dan gerakan nasionalis Indonesia bisa saja saling memberikan pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist kerja

sama dengan Pustaka Pelajar.

- . 2002. *Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara dan Dunia*. Yogyakarta: Kalam.
- . "Kata Pengantar" dalam Tjamboek Berdoeri. *Indonesia dalam Api dan Bara*. Jakarta: Elkasa, 2004. hal. 1-78.
- . 2015. *Di bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Semangat Antikolonial*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Eberhard, Wolfram. 1958. *A History of China*. London: Routledge.
- Heersink, Christiaan G. 1994. "Selayar and The Green Gold: The Development of The Coconut Trade on an Indonesian Island (1820-1950)". *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 25, No. 1, Maret
- Heri Kusuma Tarupay. 2012. *Sejarah Sekolah Cina di Makassar 1908-1966: Proses Pembentukan Identitas Orang Cina*. Makassar: Skripsi tidak diterbitkan pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Ivan Taniputera. 2008. *History Of China*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.
- Mona Lohanda. 2002. *Growing Pains: The Chinese and The Dutch in Colonial Java, 1890-1942*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Poeze, Harry A. 1982. *Politiek-Politioenele Overzichten van Nederlandsch-Indie: Deel I 1927-1928*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- . 1988. *Politiek-Politioenele Overzichten van Nederlandsch-Indie: Deel III 1931-1934*. Dordrecht: Foris Publications.
- . 1994. *Politiek-Politioenele Overzichten van Nederlandsch-Indie: Deel IV 1935-1941*. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Sutherland, Heather. "Kontinuitas dan

Perubahan dalam Sejarah Makassar: Perdagangan dan Kota di Abad ke-18” dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy (peny.). *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ombak. 2004. hal. 3-40.

Williams, Lea. 1960. *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of The Pan-Chinese Movement in Indonesia, 1900-1916*. Illinois: The Free Press.

Volkstelling 1930: Deel VII Chineez en Andere Vreemde Oosterlingen in Nederlandsch-Indie. Batavia: Departement van Economische Zaken. 1935.

Yerry Wirawan. 2013. *Sejarah Masyarakat Cina Makassar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia kerja sama dengan EFEO dan KITLV Jakarta.

sar, Tahun ke- XIII No. 176, 31 Juli 1915, hal. 2.

Surat Kabar:

“Banjknja Orang Diantjam”. *Pemberita Makassar*, Tahun ke- XXV, No. 225, 1 Oktober 1928, hal. 2.

“Boycot”, *Pemberita Makassar*, Tahun ke- XIII, No. 117, 22 Mei 1915, hal. 2.

“Hari Besar”, *Pemberita Makassar*, Tahun ke- XIII, No. 37, 13 Februari 1914, hal. 2.

“Kepala Batoe”, *Pemberita Makassar*, Tahun ke- XII, No. 54, 3 Maret 1914, hal. 2.

“Politie Rapport “tanggal 5 Maret 1914”, *Pemberita Makassar*, Tahun ke- XII, No. 55, 6 Maret 1914, hal. 2.

“Politie Rapport “tanggal 7 Maret 1914”, *Pemberita Makassar*, Tahun ke- XII, No. 57, 9 Maret 1914, hal. 2.

“Politie Rapport“ tanggal 4 Maret 1914”, *Pemberita Makassar*, Tahun ke- XII, No. 54, 3 Maret 1914, hal. 2.

“Tjegah Orang Tionghoa Memboycot Barang Jepang”, *Pemberita Makas-*